

**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA
DESA PADA MASYARAKAT DI DESA BUATA
KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

Oleh

**TAUFIK ADAHU
NIM : S2117019**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
sarjana ilmu pemerintahan universitas ichsan gorontalo



**PROGRAM STARATA SATU (S-1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
**PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA
DESA PADA MASYARAKAT DI DESA BUATA
KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

Oleh

TAUFIK ADAHU
S.2117019

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
dan telah disetujui oleh tim pembimbing
Gorontalo, , 2021

Pembimbing I


Marten Nusi, S.IP.,M.AP

NIDN : 0901028502

Pembimbing II


Deliana Vitasari Djakaria,S.IP.,M.IP

NIDN : 9916019001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Darmawaty Abdul Razak, S.IP.,M.AP
NIDN : 0924076701

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA PADA MASYARAKAT DI DESA BUATA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

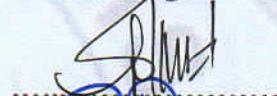
Oleh

TAUFIK ADAHU
S.2117019

Telah Di Pertahankan Di Depan Penguji
Pada tanggal/...../2021

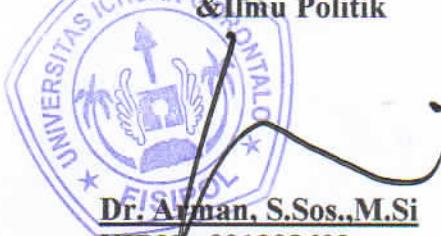
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

Tanda Tangan

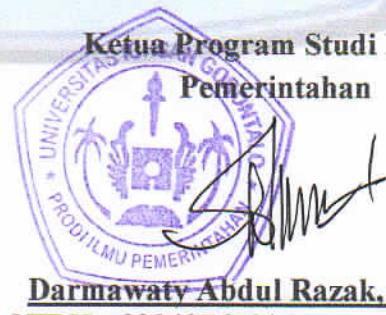


Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
& Ilmu Politik



Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 26 Juli 2021



ABSTRACT

TAUFIK ADAHU. S2117019. THE POVERTY ERADICATION THROUGH VILLAGE FUNDS IN THE COMMUNITY OF BUATA VILLAGE, ATINGGOLA SUBDISTRICT NORTH GORONTALO DISTRICT

This study aims to find out 1) the poverty eradication through village funds in the community of Buata, Atinggola Subdistrict, North Gorontalo District, and 2) the obstacles and solutions in poverty eradication through village funds in the community of Buata, Atinggola Subdistrict, North Gorontalo District. The method used in this study uses a qualitative method. The data collection employs observation, interviews, and documentation. The data analysis technique applies data collection, data presentation, and conclusions. The results of the study indicate that: 1) in case of poverty eradication through village funds, there has been a change in the poverty rate of the community of Buata with the development of infrastructure and community empowerment as well as social assistance by the village government. However, community empowerment is still less effective in terms of building employment and village-owned enterprises, and 2) the inhibiting factor is the lack of village government skills in accounting for reporting the use of village funds so that village development funding is hampered, and the attitude of the community which neglects the development in the village.

Keywords: poverty, village fund, community



ABSTRAK

TAUFIK ADAHU. S2117019. PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA PADA MASYARAKAT DI DESA BUATA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) bagaimana pengetasan kemiskinan melalui dana desa pada masyarakat di Desa Buata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, dan 2) untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pengentasan kemiskinan melalui dana desa pada masyarakat di Desa Buata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 1) dalam pengentasan kemiskinan melalui dana desa mengalami perubahan angka kemiskinan masyarakat di Desa Buata dengan adanya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan sosial oleh pemerintah desa. Namun dalam pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dalam hal membangun lapangan kerja dan usaha milik desa, dan 2) yang menjadi faktor penghambatnya kurangnya kecakapan pemerintah desa dalam pembukuan pelaporan penggunaan keuangan desa sehingga terhambatnya pembiayaan pembangunan desa, dan sikap masyarakat yang tidak memperdulikan pembangunan di desa.

Kata kunci: kemiskinan, dana desa, masyarakat



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (Q.S Al-‘Alaq 1-5)

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan kepada Allah yang maha kuasa, berkat dan rahmat dan nikmat detak jantung, denyut nadi nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikannya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsiku pada orang-orang tersayang.

Kupersembahkan cinta dan kasih sayangku kepada kedua orang tuaku, serta keluarga besar tercinta dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang tentunya telah banyak berbagi waktu dan ilmu dengan saya selama proses perkuliahan.

Dan teruntuk dosen yang membimbingku serta banyak membantu sampai ketahap akhir.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal yang sederhana ini, yang berjudul “Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Pada Masyarakat Di Desa Buata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara” dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam usulan penelitian ini adalah hasil karya yang masih sangat sederhana. Namun, penulis persembahkan kehapan para pembaca yang budiman, semoga setelah menelaah isinya berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif guna penyempurnaan usulan penelitian ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku, atas segala do'a dan dukungan morilnya
2. Ibu Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. Abdul Gafar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Arman S.sos, M.Si., Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Ibu Darmawaty Abd. Razak S.IP., M.AP., Sebagai ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Marten Nusi, S.IP.,M.AP, Selaku Dosen Pembimbing I
7. Ibu Deliana Vitasari Djakaria, S.IP.,M.AP Selaku Dosen Pembimbing II
8. Ibu Sandy Prahara ST., M.SI Selaku Pembimbing Akademik
9. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
10. Teman teman seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017

Semoga bantuan dan dorongan yang calon peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.

Gorontalo, 04 April 2021

Taufik Adahu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2.Rumusan Masalah	6
1.3.Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4.Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1.Kemiskinan.....	8
2.1.1....Pengertian Kemiskinan.....	8
2.1.2....Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....	11
2.2.Konsep Dana Desa.....	13
2.2.1....Pengertian Dana Desa.....	13
2.2.2....Pemanfaatan Dana Desa.....	14
2.2.3....Prinsip Pengelolaan Dana Desa.....	18
2.3.Kerangka Fikir.....	20

BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1.Jenis Penelitian.....	22
3.2.Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3.3.Fokus Penelitian.....	22
3.4.Sumber Data.....	23
3.5.Informan Penelitian.....	23
3.6.Pengumpulan Data.....	24
3.7.Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1.Hasil Penelitian.....	27
4.2.Pembahasan.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1.Kesimpulan.....	52
5.2.Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi rupa awal kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam mengelola keuangan desa. Mengingat anggaran yang di terima oleh desa berjumlah cukup besar serta lebih meningkat setiap tahunnya, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mengelola dana desa, dibutuhkan profesionalisme aparatur desa yang berkualitas dan sarana pendukung yang tersedia agar penyeleggarannya menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Desa mempunyai wewenang dalam menata dan memelihara keperluan masyarakatnya dalam semua segi, seperti dalam pelayanan, penataan, dan pengembangan kemandirian masyarakat. Peran pemerintah desa dianggap sangat diperlukan dalam semua segi kehidupan masyarakat, perubahan baru dan pemeliharaan pemerintah desa terhadap tersedianya sarana dan prasarana desa.

Menjalankan fungsi sebagai pemerintah desa, aparatur desa diperhadapkan dengan tanggungjawab yang begitu berat, dengan memperhatikan desa sebagai satuan yang nampak dan bertemu langsung dengan masyarakat. Sekarang ini, peran pemerintah desa amat dibutuhkan untuk mendukung semua macam pekerjaan pembangunan. Bermacam inovasi sosial yang direncanakan dipublikasikan dan diselenggarakan melalui pemerintah desa. Agar bisa

melakukan perannya secara efektif dan efisien, kualitas pemerintah desa dipandang perlu dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan disekitarnya. Inovasi sosial yang ada pada masyarakat dikarenakan terjadinya pelaksanaan pembangunan yang butuh diseimbangkan dengan pengembangan kualitas kerja pemerintah desa. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Pengelolaan dana desa menjadi suatu persoalan strategis pada pemerintahan saat ini. Baik persoalan mengenai otonomi daerah lebih khusus desa, maupun peraturan lama lingkupnya. Persoalan yang sering kali dibicarakan yakni tentang semua desa di wilayah Indonesia berjumlah 74.754 desa, diduga akan menerima cucuran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) guna dalam pembangunan desa. Dana yang dikasih juga tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh dana sebesar 600 juta hingga 1,4 miliar rupiah.

Kehadiran desa berdasarkan yuridis resmi diterima dalam undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa. Sesuai dengan ketetapan ini maka desa bisa melaksanakan otonomi yang lebih meluas guna menata dan memelihara secara mandiri kepentingan pemerintahan sesuai asas otonomi serta tugas pembantuan. Oleh karena itu desa diberikan hak, kewajiban dan kewenangan dalam mengelola semua sarana dan prasarana desa tersebut untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Penyerahan otonomi yang begitu luas pada desa ini mempunyai 2 sebab yakni karena menurunnya keterampilan dan efektifitas pemerintah desa untuk mendukung jalannya pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa, serta klaim perluasan otonomi itu pun timbul sebagai respon dalam menhadapi *rea new game* yang membawa *new rules* untuk semua aspek kehidupan manusia di massa mendatang. (Mardiasmo, 2012:47).

Maka dari itu, pemerintah Indonesia menerbitkan ketentuan yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan dana yang disediakan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa, yang berasal dari dana perbandingan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. (PP no. 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 11). Divisi dari dana perbandingan pusat dan daerah yang diperoleh dari kabupaten/kota buat desa ini paling kurang 10% dari penyaluran seimbang untuk setiap desa. (Warsono, 2014 :52).

Ketentuan ini ditempuh sebagai ukuran pelaksanaan kewenangan untuk daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Inti dari pemberian kewenangan kepada daerah ini, memusatkan pada pemanfaatan keuangan yang diperolahnya sesuai kebutuhan dan diprioritaskan masing-masing daerahnya. (Kurniati, 2016 : 19).

Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan undang-undang ialah supaya dana yang disalurkan kepada desa bisa dibagi dengan sama rata untuk 74.754 desa, mengingat berbagai macam jumlah penduduk, luas wilayah, level kemiskinan dan level perkembangan desa di Indonesia. Tantangan yang dihadapi lainnya ialah tentang bagaimana anggaran desa bisa digunakan secara efisien dan

efektif oleh desa dalam mendorong tercapainya suatu tujuan pembangunan desa, yakni meningkatkan kemakmuran masyarakat desa dan kemajuan hidup manusia serta penanganan kemiskinan.

Pemanfaatan keuangan desa diprioritaskan dalam memfinansir pelaksanaan progra kegiatan yang bersifat trayek guna dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli desa. Program kegiatan ini meliputi bidang produk prioritas desa dan produk unggulan wilayah pedesaan, Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, penampungan air kecil, serta sarana olah raga desa sesuai dengan wewenang desa. Pembangunan sarana dan prasarana olah raga desa merupakan bagian dari suatu usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama. Program kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat harus sesuai dengan wewenang desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Menaggulangi kemiskinan di desa diprioritaskan membiayai pelaksanaan program kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang tidak mempunyai pekerjaan, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (*stunting*). Aktivitas padat karya tunai dilakukan secara swakelola oleh desa dengan memanfaatkan teknologi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia di desa. Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan dengan memanfaatkan anggaran dana desa bidang pembangunan desa sekurang-kurangnya 30 % digunakan untuk membayar jasa upah masyarakat dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Jasa upah kerja dibayar dengan harian dan mingguan

dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana desa. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu bagian pokok dari penilaian kinerja suatu pemerintahan pada sektor kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan kemiskinan adalah tolak ukur dasar untuk mengukur kualitas hidup manusia. Masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan akan mengalami banyak kesulitan dalam meraih berbagai macam fasilitas yang bisa mendukung peningkatan kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu, tidak ada satu pemerintahan di seluruh dunia memandang sebelah mata fenomena kemiskinan yang terjadi di wilayahnya. Begitu pula persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum kunjung berakhir bagi pemerintah Indonesia. Tentu saja persoalan kemiskinan berimbang ke berbagai daerah, termasuk di Desa Buata. Meskipun Desa Buata memiliki dana desa dengan penerimaannya sebesar Rp. 265.541.760 untuk penerimaan tahap 1, Rp. 267.061.240 untuk tahap 2, dan Rp. 157.200.000 untuk penerimaan tahap 3. Namun persoalan kemiskinan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Desa Buata, masyarakatnya sebagian besar tergolong miskin walaupun dalam setiap tahunnya di Desa Buata selalu menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) setiap bulannya sebesar Rp. 600.000 setiap Keluarga dan bantuan pemerintah desa lainnya melalui dana desa diterima dengan jumlah yang lumayan besar yakni berjumlah Rp. 689.803.000. Hal ini dikarenakan kurangnya lapangan kerja bagi masyarakat serta tidak ada

pengembangan pemberdayaan masyarakat pada aspek ekonomi dalam pelaksanaan program pemberdayaan warga masyarakat dengan Dana Desa.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik dalam mengali informasi terkait dengan pengentasan kemiskinan melalui dana desa dengan judul penelitian “Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Pada Masyarakat di Desa Buata Kecamatan Atinggola”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengentasan kemiskinan melalui dana desa pada masyarakat di Desa Buata Kecamatan Atinggola ?
- 2) Apa saja hambatan dan solusi dalam pengentasan kemiskinan melalui dana desa pada masyarakat di Desa Buata Kecamatan Atinggola ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah agar memperoleh data dan informasi berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan mengetahui sejauh mana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pokok penyusunan proposal skripsi untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Universitas Ichsan Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan melalui dana desa pada masyarakat di Desa Buata Kecamatan Atinggola ?
- 2) Untuk mengetahui faktor hambatan dan solusi dalam pengentasan kemiskinan melalui dana desa pada masyarakat di Desa Buata Kecamatan Atinggola ?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi tentang pengentasan kemiskinan dan untuk mengetahui tingkat ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- 1) Civitas akademika Universitas Ichsan Gorontalo khususnya prodi ilmu pemerintahan, memberi masukan kepada dosen dan mahasiswa di lembaga tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian terkait pengentasan kemiskinan melalui program dana desa
- 2) Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dijadikan sebagai petunjuk dalam membangun desa dan mensejahterakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di desa.
- 3) Bagi penulis, dapat menambah wawasan baru dalam mengatasi kemiskinan dilingkungan masyarakat dengan menjalankan program dana desa yang tepat sasaran sesuai dengan amanat undang-undang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengentasan Kemiskinan

2.1.1 Pengertian Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan merupakan suatu proses, cara, perbuatan, dalam mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. (<https://lektur.id/arti-pengentasan/>, diakses tanggal 12 April 2021).

Pengertian kemiskinan menurut BPS adalah “suatu keadaan seseorang yang hanya bisa memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2.100 kalori perkapita setiap hari” (Tibyan, 2010: 62). Sedangkan pengertian kemiskinan menurut BKKBN (2013) adalah “tidak bisa melakukan ibadah menurut kepercayaannya, semua anggota keluarga tidak mampu makan 2 kali sehari, semua anggota keluarga tidak mempunyai pakaian berbeda buat di rumah, sekolah, bekerja, dan bepergian bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah, tidak dapat membawa anggota keluarga ke sarana kesehatan”.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya tempat berlindung, pakaian, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan menjadi penyebab tidak adanya suatu pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kemiskinan adalah suatu keadaan yang dirasakan seseorang atau kelompok orang yang tidak bisa melaksanakan hidupnya sampai pada tahap yang dianggap manusiawi (Bagong Suyanto. 2013:37).

Adi dan Isbandi Rukminto (2015 : 27) berpendapat kemiskinan merupakan bagian kehidupan yang mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti makanan. Kebutuhan dasar manusia akan terpenuhi apabila seseorang mempunyai pekerjaan yang tetap. Dengan demikian, berdasarkan pengertian kemiskinan yang telah dijelaskan, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah sebuah kehidupan yang mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan sosial, pangan dan pendidikan dikarenakan minimnya keberadaan sumber ekonomi dalam bentuk materi maupun non materi yang diperlukan untuk menjamin kehidupan masyarakat.

Hidup miskin bukan hanya sekedar hidup dalam kekurangan dan hasil pendapatan rendah, akan tetapi banyak hal lain, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, diperlakukan tidak adil dalam hukum, rentah terhadap ancaman tindak kriminal, tidak berdaya dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005:47). Kimiskinan terbagi dalam empat macam, yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Keadaan di mana seseorang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata kemiskinan atau tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan yang dibutuhkan agar dapat hidup dan bekerja.

2) Kemiskinan Relatif

Keadaan miskin karena dipengaruhi oleh kebijakan pembangunan yang belum sampai ke semua masyarakat, sehingga menimbulkan ketimpangan pada pendapatan.

3) Kemiskinan Kultural

Berhubungan dengan permasalahan sikap masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak ingin berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, pemboros, malas, dan tidak kreatif walaupun ada bantuan dari pihak luar.

4) Kemiskinan Struktural

Keadaan kemiskinan seseorang yang disebabkan oleh rendahnya akses pada sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial politik dan sosial budaya yang tidak menjamin pembebasan kemiskinan, namun seringkali menyebabkan bertambahnya kemiskinan. (Suryawati, 2005:47).

Kemiskinan juga bisa dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1) Kemiskinan Alamiah

Berhubungan dengan minimnya Sumber Daya Alam (SDA) dan prasarana umum, serta kondisi tanah yang tandus.

2) Kemiskinan Buatan

Bentuk kemiskinan ini sering disebabkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menjadikan masyarakat tidak bisa menguasai sumber daya, fasilitas ekonomi yang ada, dan sarana secara merata.

Kemiskinan menurut Edi Suharto (2012: 219) adalah tidak samanya kesempatan dalam menghitung semua kekuasaan sosial. Aspek kekuasaan sosial meliputi :

- a) Sumber keuangan (modal, kredit, dan mata pencarian)
- b) Modal fisik atau aset (perumahan, tanah, alat produksi, kesehatan)

- c) Hubungan sosial untuk mendapatkan barang dan jasa, barang, pekerjaan
- d) Organisasi politik dan yang dipakai untuk meraih kepentingan bersama.
- e) Informasi yang bermanfaat dalam perkembangan hidup
- f) Keterampilan dan pengetahuan

Dari pengertian di atas, bisa disimpulkan kemiskinan adalah tidak mampunya seseorang dalam bermacam aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan pendidikan yang melangsungkan hidupnya dengan serba kekurangan dan tidak sanggup dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.

2.1.2 Strategi Penaggulangan Kemiskinan

Koreten (dalam Hikmat 2014 : 15 – 16) menyatakan ada 3 dasar dalam melaksanakan perubahan – perubahan normatif dan struktural dalam perubahan yang terfokus pada masyarakat yaitu :

- 1) Memfokuskan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan kondisi-kondisi yang mendukung dan mendorong upaya-upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, serta untuk menjadi solusi dalam pemecahan permasalahan mereka sendiri, pada tingkat keluarga, komunitas, dan individua.
- 2) Meningkatkan proses organisasi-organisasi yang berfungsi sesuai kaidah sistem organisasi dan semua struktur
- 3) Meningkatkan pengendalian lokal dan sistem produksi-konsumsi pada organisasi secara tutorial yang didasarkan pada kaidah pemilikan

Mengatasi kemiskinan diperlukan kerja sama semua pihak, baik swasta, pihak asing, dan pemerintah. Pada teori ekonomi dikatakan bahwa untuk memutus mata rantai kemiskinan bisa dilakukan pengembangan teknologi, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, dan penambahan modal investasi. Akan tetapi dalam praktek permasalahannya tidak semudah yang dibayangkan. (Nugroho dan Gunarso Dwi, 2016 : 57)

Program pengentasan kemiskinan telah banyak dilakukan di beberapa negara. Sebagai perbandingan di negara Amerika Serikat program penanggulangan kemiskinan diarahkan dalam meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara bagian, memperbaiki keadaan permukiman perdesaan dan perkotaan, perluasan kerja untuk para pemuda dan kesempatan pendidikan, pelaksanaan pelatihan bagi orang dewasa dan penyelenggaraan pendidikan, serta pemberian bantuan kepada orang miskin yang sudah lanjut usia. (Nugroho dan Gunarso Dwi, 2016 : 57)

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia telah banyak dilakukan, seperti : perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, dan pengembangan desa tertinggal. Saat ini pemerintah melaksanakan program tersebut secara menyeluruh, terutama pada saat krisis moniter dan ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997, melalui program jaring pengaman sosial (JPS).

Sedangkan, Pembinaan dan Pengembangan Keterampilan Pegawai (PPKP) sendiri sebagai program pengentasan kemiskinan di perkotaan lebih menfokuskan

pda peningkatan pendapatan masyarakat dengan memposisikan masyarakat sebagai pemeran utamanya melalui partisipasi aktif.

Berdasarkan prinsipnya, strategi pengentasan kemiskinan terpadi dapat digambarkan seperti di bawah ini : (Santoso Slamet, 2015 : 37)

- 1) Pemberdayaan masyarakat : usaha mengembangkan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif masyarakat sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, memperkuat martabat manusia dan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi.
- 2) Aspek usaha, manusia, dan lingkungan
- 3) Proses : perlindungan, penyiapan, penguatan, dan perlindungan
- 4) Sasaran pasca produktif (> 60 tahun), pra produktif (< 15 tahun), dan produktif ($15 - 60$ tahun).
- 5) Pusat sasaran pemberdayaan masyarakat miskin luas dalam bentuk pemberdayaan usaha mikro kecil.
- 6) Dilakukan dalam 2 usaha yaitu : 1) mengembangkan produktivitas dan pendapatan masyarakat miskin luas, dan 2) meringankan beban orang miskin.

2.2 Konsep Dana Desa

2.2.1 Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang dikeluarkan dari desa guna keperluan pembangunan desa. Dana desa ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005 tentang desa, Alokasi Dana Desa (ADD) ialah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kota/kabupaten untuk desa paling kurang 10 % (sepuluh perseratus), yang pebahagiannya buat desa secara proposinal (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 2005:29).

Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: 41).

Peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 tentang panduan pengelolaan keuangan desa dikatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota/kabupaten yang berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kota/kabupaten buat desa paling kurang 10 %.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan Alokasi Dana Desa (ADD) ialah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah.

2.2.2 Pemanfaatan Dana Desa

Penggunaan dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas proses perencanaan Desa, mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha

masyarakat Desa lainnya, pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penggunaan Dana Desa harus mampu meningkatkan pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa, penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Dalam memenuhi kebutuhan pokok, maka prioritas penggunaan Dana Desa yaitu; pengembangan pos-pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini. Penggunaan dana desa untuk prioritas penggunaan sarana dan prasarana desa harus mendukung target pembangunan sektor unggulan, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya yang diprioritaskan. Target yang diprioritaskan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan mendukung pariwisata dan industri. Untuk sarana dan prasarana yang didasarkan pada kondisi dan potensi desa, yang sejalan dengan pencapaian target dalam RPJMN desa dan RKP desa setiap tahunnya, yang diantaranya meliputi: dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana antara lain: pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, pembangunan dan pemeliharaan embung desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan dan pemeliharaan

sanitasi lingkungan. Selanjutnya untuk pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa, pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier, pembangunan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan, dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.

Dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa, agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik.

Penggunaan dana Desa juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi.

Penggunaan Dana Desa memiliki dua bidang yang diprioritas dan harus dijalankan yaitu bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, yang ke duanya ini menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa. (dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 tentang penggunaan dana desa untuk pembangunan desa pasal 5).

1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain :

- a) Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan
 - b) Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa bersama, maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat lainnya
 - c) Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
 - d) Pengorganisasian masyarakat, fasilitas dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa
 - e) Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan tenaga medis di desa
 - f) Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan, pantai, dan desa
 - g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup atau bidang pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa
- 2) Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan dana Desa dalam pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta

penanggulangan kemiskinan. Maka dari itu, penggunaan dana Desa diarahkan pada program-program seperti berikut:

- a) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman
- b) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
- c) Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi
- d) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup

2.2.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terdapat prinsip penganggaran desa. Penganggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut : (Sumpeno, 2011 : 2).

- 1) Akuntabilitas pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud terutama menyangkut masalah finansial.

- 2) Transparansi pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan Desa.
- 3) Profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang Aparatur sesuai dengan jabatannya.
- 4) Partisipasi masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat
- 5) Pelaksanaan pemerintahan yang efektif
- 6) Pemerintah cepat tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 7 tentang desa mengemukakan penataan desa yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, bisa melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud bertujuan :

- 1) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 2) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 3) Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- 4) Meningkatkan daya saing Desa
- 5) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

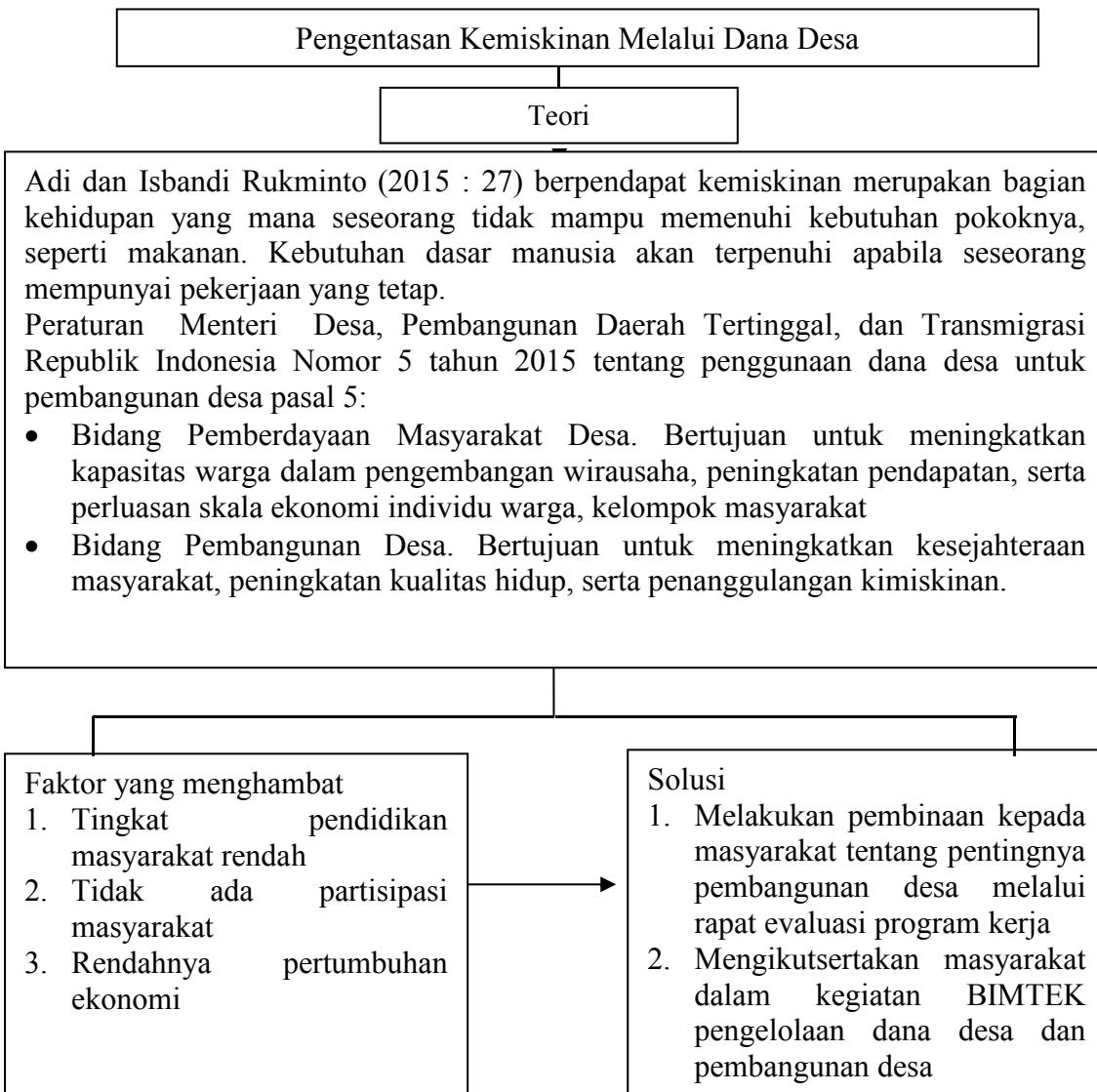
Pengelolaan keuangan desa bisa dilakukan dengan baik pastinya harus didukung oleh Sumber Daya Mansia yang berkualita dan kompeten serta sistem dan prosedur keuangan yang mencukupi.

2.3 Kerangka Fikir

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bertambahnya angka kemiskinan dikalangan masyarakat dan mengetahui efektivitasnya dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembuatan saran dan kebijakan untuk peraturan pemerintah agar tepat sasaran. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengentasan kemiskinan melalui dana desa dikalangan masyarakat.

Peneliti berusaha untuk menggali informasi apakah upaya pemerintah desa berjalan dengan baik atau masih ada pihak dominan dalam pembangunan. Dengan menggunakan teori pengentasan kemiskinan oleh Santoso Slamet, (2015), peneliti mencoba mendeskripsikan pengentasan kemiskinan melalui dana desa dan faktor yang menghambat dan solusinya dalam pengentasan kemiskinan

Berdasarkan pernyataan di atas, tinjauan landasan teori, dan penelitian dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis yang tersaji pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Fikir

Dari gambar di atas, dapat dikatakan dalam mengatasi kemiskinan masyarakat diperlukan adanya kerja sama pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Lofland, dikutip dalam bukunya Lexy J. Maleong, menyatakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah dengan kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen. (Lofland dalam Lexy J. Maleong, 2011 : 112). Hal yang sama yang dikatakan Bogdan dan Taylor bahwa langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data uraian berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang bisa diamati. Menurut mereka pendekatan seperti ini ditujukan pada latar individu tersebut secara utuh. (Lofland dalam Lexy J. Maleong, 2011 : 3).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan April 2021. Lokasi penelitian yaitu wilayah Desa Buata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Dipilihnya Lokasi penelitian di desa Buata disebabkan terdapat permasalahan yang diteliti yakni tentang pengentasan kemiskinan melalui dana desa dipandang perlu untuk dikaji lebih mendalam.

3.3 Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus utama pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengentasan kemiskinan dikalangan masyarakat melalui dana Desa dan faktor yang menghambat serta solusi dalam pengentasan kemiskinan.

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka fokus penelitian adalah :

- 1) Pemberdayaan masyarakat
- 2) Sasaran pemberdayaan masyarakat produktif
- 3) Meringankan beban masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitas pendapatan masyarakat miskin luas
- 4) Faktor penghambat pengentasan kemiskinan melalui dana desa dikalangan masyarakat

3.4 Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini bersumber atas dua macam data, yaitu :

- 1) Data Primer

Data yang didapat dari wawancara langsung dengan subjek penelitian sesuai pedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan dan hasil observasi.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder; yakni data yang berwujud arsip penting atau dokumentasi yang didapat dari dinas tertentu seperti majalah, buku, dokumentasi yang sesuai dengan penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah semua orang yang termasuk dalam persoalan penelitian. Dipilihnya informan guna mencari berita/informasi terkait dengan pembangunan desa dan bagaimana penggunaan dana desa tersebut. Tehnik dalam memilih informan dengan menggunakan pengambilan sampel berjumlah 12 terdiri dari pemerintah desa berjumlah 7 orang, dan dari masyarakat 5 orang secara subjektif

yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Adapun informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu :

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Aparat Desa
- 4) Masyarakat

3.6 Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa macam metode seperti di bawah :

- 1) Observasi

Observasi merupakan teknik pertama yang digunakan dalam langkah-langkah pengumpulan data guna memperoleh gambaran umum terhadap objek penelitian dan lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan cara mengkaji dan mengamati perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran penelitian dengan berperan serta dalam kegiatannya. (Maleong, 2011 : 135). Pada pelaksanaan observasi hal-hal yang diamati yaitu keluarga, dan masyarakat.

- 2) Wawancara

Wawancara pada penelitian ini yaitu untuk memperdalam dan melengkapi hasil penelitian. Metode wawancara adalah teknik dalam usaha mengumpulkan data yang akurat yang akan dipergunakan dalam melakukan proses pemecahan permasalahan yang sesuai dengan data. Metode ini merupakan alat untuk mengumpulkan data guna mendapatkan berita/informasi dari sumbernya. Melalui wawancara, peneliti bisa mengutarakan beberapa pertanyaan secara lisan dan

dijawab dengan lisan juga. Pada wawancara ini objek penelitian yakni masyarakat dan pemerintah desa Buata.

3) Dokumentasi

Dokumentasi ialah sumber data yang digunakan dalam melengkapi penelitian, berupa sumber tertulis, foto (gambar) dan yang semua itu memberikan berita/informasi untuk proses penelitian. (Iman Gunawan, 2013 : 178).

3.7 Tehnik Analisis Data

Model analisis data digunakan ialah model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara terus menerus.

- 1) Pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti melakukan studi awal dengan observasi
- 2) Penyajian data, setelah data direduksi maka langkah-langkah selanjutnya yang dilaksanakan oleh peneliti adalah mendisplay data. Penyajian data yang dilaksanakan peneliti ialah dengan jalan membuat gambaran tentang cara pemerintah desa mengatasi kemiskinan masyarakat.
- 3) Penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang diutarakan bersifat sementara. Kemudian akan berubah apabila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya, akan tetapi ketika kesimpulan yang diutarakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti - bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut.

Tehnik yang bejenis kualitatif, digambarkan dengan kata - kata atau kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk mendapatkan kesimpulan sehingga lebih mudah dimengerti oleh diri pribadi maupun orang lain. (Ahmad Tanzeh, 2009 : 57).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1) Sejarah Berdirinya Desa Buata Kecamatan Atinggola

Desa Buata berdiri Tahun 1868 ,Desa Buata sesuai nama aslinya “Po Buata” (Tumpuan perjalanan) yakni perjalanan para leluhur dari Polanggu (Pusat Kerajaan Atinggola) di Bolango sebelah Selatan, Desa Buata ke Utara yakni Kecamatan Atinggola. Desa Buata pada awalnya sebagai pusat Kerajaan Atinggola menduduki Desa Kota Jin dan sekitarnya yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Kaidipang besar dan berpindahlah pusat Kerajaan Atinggola Desa Kota Jin.

Penduduk desa Buata terbagi dari berbagai etnis (suku) yaitu :

- a) Suku Suwawa
- b) Suku Atinggola
- c) Suku Gorontalo
- d) Suku Bolango
- e) Suku Bintauna
- f) Suku Bolangitang

Dan masih ada sebagian kecil suku-suku Atinggola dan suku Suwawa mendominasi penduduk Desa Buata sampai dengan saat ini.

2) Visi Misi dan Tujuan

- a) Visi

Adapun visi Desa Buata yaitu

“Terciptanya aktivitas prima dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan pemberdayaan kearah masyarakat sejahtera”

a) Misi

- Mengembangkan kualitas sumber daya masyarakat dan sumber daya aparatur yang mempunyai keahlian pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan IMTAQ yang baik
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik
- Mengembangkan kualitas pelayanan publik
- Memberdayakan potensi desa
- Memberdayakan masyarakat dalam menunjang pembangunan

b) Tujuan

- Tersedianya sistem tata kelola pegawai dan aparat yang berkualitas untuk menjamin terlaksananya layanan prima masyarakat
- Terjangkaunya pelayanan kepada masyarakat
- Pengembangan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak
- Peningkatan kinerja pegawai dan aparat
- Pencapaian target penerimaan pajak
- Pengembangan partisipasi generasi muda dalam pembangunan

3) Data Demografis Desa Umum

Desa Buata merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk sedikit jika di bandingkan dengan desa lain yang berada di kecamatan Atinggola. Penduduk berjumlah 412 jiwa. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
Laki – Laki	219
Perempuan	193

Sumber Data : Profil desa Buata tahun 2021

Dari tabel 1.1 di atas diketahui jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 219 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 193 jiwa.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
0 – 4 Tahun	40
5 – 9 Tahun	41
10 – 14 Tahun	55
15 – 19 Tahun	35
20 – 24 Tahun	31
25 – 29 Tahun	28
30 – 34 Tahun	38
35 – 39 Tahun	40
40 – 44 Tahun	35
45 – 49 Tahun	19
50 – 54 Tahun	16
55 – 59 Tahun	21
60 – 64 tahun	3
65 Keatas	10
Jumlah Total	412

Sumber Data : Profil Desa Buata Tahun 2021

Tabel 1.2 di atas menunjukan jumlah penduduk sebanyak 412 jiwa terdiri dari yang berusia 0 - 4 tahun berjumlah 40 jiwa, penduduk yang berusia 5 – 9 tahun berjumlah 41 jiwa, penduduk yang berusia 10 – 14 tahun berjumlah 55 jiwa, yang berusia 15 – 19 tahun berjumlah 35 jiwa, yang berusia 20 – 24 berjumlah 31 jiwa, berusia 25 – 29 jiwa berjumlah 28 jiwa, berusia 30 – 34 berjumlah 38 jiwa, berusia 35 – 39 berjumlah 40 jiwa, berusia 40 – 44 berjumlah 35 jiwa, berusia 45 – 49 berjumlah 19 jiwa, berusia 50 – 54 berjumlah 16 jiwa, berusia 55 – 59 berjumlah 21 jiwa, berusia 60 – 64 berjumlah 3 jiwa, dan penduduk yang berusia 65 tahun ke atas berjumlah 10 jiwa.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	3
2	TNI / Polri	3
3	Swasta	11
4	Pensiunan	9
5	Petani / Buruh Tani	120
6	Wiraswasta	2
7	Pedagang	12
8	Sopir	6
9	Pengrajin	13
10	Tukang Kayu	9
11	Tukang Batu	12
12	Nelayan	15
13	Ibu Rumah Tangga	105
14	Tidak Produktif	10
	Jumlah Total	336

Sumber Data : Profil Desa Buata Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, jumlah jenis pekerjaan sebagai PNS berjumlah 3 orang, sebagai Polri berjumlah 3 orang, berprofesi sebagai swasta berjumlah 11 orang, pensiunan ASN berjumlah 9 orang, sebagai petani berjumlah 120 orang, wiraswasta berjumlah 2 orang, sebagai pedagang berjumlah 12 orang, sebagai sopir berjumlah 6 orang, sebagai pengrajin berjumlah 13 orang, berprofesi sebagai tukang kayu berjumlah 9 orang, berprofesi sebagai tukang batu berjumlah 12 orang, berprofesi sebagai nelayan berjumlah 15 orang, sebagai ibu rumah tangga berjumlah 105 orang, dan yang tidak produktif berjumlah 10 orang.

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Kesejahteraan

Keluarga

No	Tingkat Kesejahteraan Keluarga	Jumlah
1	Keluarga Prasejahtera	50
2	Keluarga Prasejahtera 1	42
3	Keluarga Prasejahtera 2	9
4	Keluarga Prasejahtera 3	6
5	Keluarga Prasejahtera 3 Plus	10
	Total Jumlah Kepala Keluarga	117

Sumber Data : Profil Desa Buata Tahun 2021

Tabel 1.4 di atas diketahui jumlah keluarga dengan tingkat kesejahteraan keluarga prasejahtera berjumlah 50 keluarga, tingkat kesejahteraan keluarga prasejahtera 1 berjumlah 42 keluarga, tingkat kesejahteraan keluarga prasejahtera 2 berjumlah 9 keluarga, tingkat kesejahteraan keluarga prasejahtera 3 berjumlah 6 keluarga, dan tingkat kesejahteraan keluarga prasejahtera 3 plus berjumlah 10 keluarga.

Tabel 1.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Masyarakat di Desa Buata

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Tamat SD/Sederajat	109
2	SD / Sederajat	183
3	SLTP / Sederajat	80
4	SLTA / Sederajat	37
5	D1 / D2	2
6	D3	-
7	S1 / S2	1
TOTAL		412

Sumber Data : Profil Desa Buata Tahun 2021

Tabel 1.5 menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Buata dengan rincian 1) belum tamat sekolah dasar atau yang sederajat berjumlah 109 orang, 2) masyarakat yang lulusan Sekolah Dasar atau yang sederajat berjumlah 183 orang, 3) lulusan SLTP atau yang sederajat berjumlah 80 orang, 4) lulusan SLTA atau yang sederajat berjumlah 37 orang, 5) lulusan D1 dan D2 berjumlah 2 orang, dan 6) lulusan S1 berjumlah 1 orang.

4) Keadaan Sosial Masyarakat Desa Buata

Kondisi hidup masyarakat dapat digolongkan sebagai masyarakat di bawah garis menengah ke bawah lebih khusus masyarakat keluarga miskin yang sesuai data statistik tahun 2020 mencapai 49 keluarga miskin untuk penunjang permasalahan ditinjau dari kondisi sosial ekonomi yang sangat memprihatinkan. Penyebab terjadinya kemiskinan disebabkan keterampilan dan pendidikan pada umumnya sangat rendah.

5) Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Buata

Tata guna yang dikelola oleh masyarakat di desa Buata sebagian besar adalah lahan pertanian, menunjukkan mayoritas pekerjaan masyarakat sebagai buruh tani dan petani. Tanaman yang utama meliputi tanaman jagung, dan padi.

Diantara mata pencaharian di atas, masyarakat sebagian kecil berpropesi sebagai TNI / POLRI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga medis, karyawan swasta, nelayan, dan jasa transportasi. Hal yang dikembangkan sebagai salah satu usaha untuk mendobrak perekonomian masyarakat untuk usaha peningkatan hasil usaha dibidang pertanian adalah membentuk kelompok tani dan kelompok ternak.

4.1.2 Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Pada Masyarakat Di Desa Buata Kecamatan Atinggola

1) Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buata

Hasil penelitian menunjukkan tata kelola dana desa tahun 2021 oleh pemerintah desa Buata dimulai dari penyusunan dan penetapan RKP Desa dan APBDesa yang merupakan bagian dari tahap perencanaan dalam pengelolaan dana desa yang menjadi satu kesatuan dengan keuangan desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa dalam perencanaan sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa mengatakan seluruh rangkaian tahap mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tersebut merupakan upaya pemerintah Desa Buata untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut karena akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku”. (*Hasil Wawancara* dengan Adam Is Hamidjun, Kepala Desa Buata, Tanggal 20 Juni 2021).

Ditambahkan oleh Sekretaris Desa menyatakan :

Pada perencanaan pengelolaan dana desa segenap masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan. Biasanya dalam perencanaan ini sebelum pencairan dana desa Pemerintah Desa mengadakan rapat dan musyawarah desa untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Hal dilakukan pemerintah desa agar supaya dalam penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku (*Hasil Wawancara* dengan Hartono Datau Sekretaris Desa Buata, Tanggal 20 Juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana desa, masyarakat ikut terlibat dalam pengelolaan melalui musyawarah dan rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebelum anggaran dana desa dicairkan.

Kaur Pemerintah menyatakan perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan. Perencanaan merupakan tahap awal dari berjalannya suatu kegiatan, sehingga perencanaan harus dilakukan dengan matang agar kedepannya kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif. Perencanaan yang merupakan tonggak awal berjalannya pengelolaan dana desa harus direncanakan dengan baik dan menjadi hal urgent dalam pengelolaan dana desa (*Hasil Wawancara* dengan Yusrin Desei Kaur Pemerintah, Tanggal 20 Juni 2021).

Dari pendapat kaur pemerintahan di atas, penulis simpulkan perencanaan merupakan suatu kegiatan awal dalam menentukan semua bentuk kegiatan yang menentukan keberhasilan pengelolaan dana desa yang harus direncanakan dengan baik agar terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Kaur Perencanaan Pembangunan Desa Buata bahwa dalam rangka pengoptimalan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat haruslah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Perlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap tersebut bertujuan agar masyarakat paham dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang akan mereka lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan (*Hasil Wawancara* dengan Hadijah Monoarfa Kaur Perencanaan Pembangunan, Tanggal 20 Juni 2021). Sebagaimana yang dikatakan oleh tokoh masyarakat dalam perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Buata sebagian masyarakat dilibatkan oleh pemerintah desa dengan diadakannya musyawarah setiap dusun yang ada di desa untuk membahas tentang pengelolaan dana desa. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua masyarakat ikut andil dalam kegiatannya disebabkan kesibukan masing-masing masyarakat itu sendiri (*Hasil Wawancara* dengan Sance Monoarfa Tokoh Masyarakat Tanggal 20 Juni 2021).

Hasil wawancara dengan Kaur Perencanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa perlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa sangat menentukan arah dan tujuan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi hanya sebagian masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Hasil wawancara dengan bendahara desa mengatakan Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat dana desa di Desa Buata sendiri melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh melalui rapat yang dilaksanakan pada tingkat dusun, dimana masyarakat sering menyebutnya *rembug*/rapat lingkungan. (*Hasil Wawancara* Anis Abdullah dengan Bendahara Desa Tanggal 22 Juni 2021).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam merencanakan pengelolaan dana desa masyarakat dilibatkan secara menyeluruh melalui rapat disetiap dusun untuk membahas perencanaan program pembangunan dengan memanfaatkan dana desa.

Menurut Kepala Desa bahwa proses pemanfaatan juga belum tampak dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa. Tahap pemanfaatan merupakan tahap lanjutan ketika tahap pemahaman mampu diterima baik oleh masyarakat, sehingga setelah masyarakat paham mereka mampu

memanfaatkan potensi yang dimiliki. Namun karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan berimplikasi pada tahap memanfaatkan yang juga belum dilakukan. Sejauh ini masyarakat masih belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan hidup karena masyarakat belum paham terhadap potensi yang dimiliki. Hal tersebut menyebabkan perencanaan pengelolaan dana desa belum mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki, sehingga pengelolaan dana desa sejauh ini hanya terfokus pada kegiatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur saja. (*Hasil Wawancara* dengan Adam Is Hamidjun, Kepala Desa Buata, Tanggal 22 Juni 2021).

Dari hasil wawancara dengan kepala desa di atas, bisa peneliti simpulkan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki terutama pada masyarakat desa Buata menyebabkan pemanfaatan dana desa hanya terfokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa saja.

Ditambahkan pula oleh tokoh masyarakat

menyatakan bahwa hal yang dibahas di dalam rapat lingkungan meliputi permasalahan di tingkat dusun saja, salah satu contohnya adalah adanya gorong-gorong kerusakan atau selokan yang tersumbat. Pada tahap perencanaan masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya usulan masalah dan solusi tersebut dibawa oleh perwakilan tiap-tiap dusun ke tingkat Musyawarah Desa. (*Hasil Wawancara* dengan Saleha Helingo Tokoh Masyarakat Tanggal 22 Juni 2021).

Pembahasan di dalam rapat pada tingkat dusun berkaitan dengan permasalahan lingkungan seperti saluran air yang rusak datang pengusulan solusi dari permasalahan yang ada perwakilan setiap dusun di Desa Buata.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Buata tahun 2021 berdasarkan indikator kepatuhan terhadap prosedur telah terwujud. Hal tersebut karena seluruh rangkaian prosedur atau tahapan pengelolaan Dana Desa tahun 2021 oleh pemerintah Desa Buata taat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui setelah perencanaan, pemerintah Desa Buata melaksanakan program dan kegiatan dana desa yang telah ditetapkan sebagai manifestasi Pasal 24 hingga 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa serta Pasal 23 hingga 32 Peraturan Bupati Buol tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Selama pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Desa Buata juga melakukan pencatatan dan mengumpulkan kelengkapan administrasi yang merupakan bentuk penatausahaan sesuai dengan Pasal 35 (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 33 (2) Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Hasil wawancara dengan bendahara desa Buata menyatakan bahwa laporan realisasi penggunaan anggaran kemudian dijadikan bahan penyusunan laporan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan *stakeholder* lain yang berkaitan sebagai wujud pelaporan sesuai dengan pasal 8 (1) Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020-2021 yang menyatakan bahwa kepala desa dengan dikoordinasikan oleh camat

setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I Rp. 265.541.760, tahap II Rp. 267.061.240, tahap III Rp. 157.200.000 dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahunan kepada Bupati sebesar Rp. 689.803.000. Selain itu, pertanggungjawaban juga dilakukan kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait sesuai dengan pasal 38 (1) Peraturan Bupati Buol tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang mengamanatkan bahwa laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis. (*Hasil Wawancara* dengan Anis Abdullah Bendahara Desa Tanggal 24 Juni 2021).

Pengorganisasian merupakan upaya agar suatu kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai yang diinginkan. Dalam pengorganisasian terdapat koordinasi baik antara pimpinan dan bawahan, maupun antar bawahan.

Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Buata diikuti oleh perangkat desa dan orang-orang tertentu yang memperoleh undangan rapat, sedangkan bagi masyarakat umum tidak semua yang mengikuti rapat. Tidak adanya undangan terbuka ini menyebabkan masyarakat umum cenderung tidak mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun yang akan berjalan. Tidak adanya kesempatan masyarakat umum dalam menghadiri. (*Hasil Wawancara* dengan Tajri Sunge Ketua LPM, Tanggal 24 Juni 2021).

Musrenbangdes secara langsung tidak semua masyarakat yang hadir sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kegiatan apa saja

yang akan didanai oleh dana desa. Hal tersebut berimplikasi pada pola pikir masyarakat yang hanya tau desa mendapatkan uang banyak sedangkan sumber uang dan kegunaan uang masyarakat cenderung tidak mengetahuinya. (*Hasil Wawancara dengan Hasan Taabi Ketua BPD, Tanggal 24 Juni 2021*).

Ditambahkan pula oleh Tokoh Masyarakat menyatakan :

masyarakat yang berada di Desa Buata berjumlah 412 jiwa dan sebagian besar dari jumlah masyarakat tersebut tidak mengetahui program pembangunan yang didanai dengan dana desa disebabkan karena tidak mengikuti rapat yang telah diagendakan oleh pemerintah desa. (*Hasil Wawancara dengan Yunus Desei Tokoh Masyarakat Tanggal 24 Juni 2021*).

Dari wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat di desa Buata sebagian besar tidak mengetahui setiap program pembangunan yang dilakukan di desa disebabkan tidak mengikuti setiap rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Ditambahkan pula oleh Tokoh Masyarakat

pada rapat pembahasan anggaran yang dilaksanakan di Kantor Desa sebagian besar masyarakat tidak mengikutinya karena kesibukan individu masing-masing untuk berkerja. (*Hasil Wawancara dengan Husen Dunggio Tokoh Masyarakat Tanggal 24 Juni 2021*).

Tahun 2021 sendiri perencanaan penggunaan dana desa di Desa Buata terfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, seperti pembangunan gedung serba guna, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pemanfaatan fasilitas tersebut untuk pendampingan keluarga harapan atau PKH serta kegiatan hajatan masyarakat yang tertuang di dalam RPD dana Desa Buata di tahun 2021 ini. Fokus pemerintah desa dalam membangun yaitu dengan lebih menekankan dan memperhatikan pemberdayaan masyarakat dengan tahapan perencanaan menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Buata dan sangat

memperlihatkan hasil yang signifikan. (*Hasil Wawancara* dengan Hasan Taabi Ketua BPD Desa Buata Tanggal 26 Juni 2021).

Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ketua LPM bahwa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Buata pemerintah desa menyalurkan bantuan sosial dan RASTRA bagi masyarakat miskin. (*Hasil Wawancara* dengan Tajri Sunge Ketua LPM Desa Buata Tanggal 26 Juni 2021).

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah mengupayakan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Buata dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berguna bagi masyarakat luas serta menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang ekonominya lemah atau miskin dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dilokasi penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa sangat rendah dilihat dari program pemberdayaan masyarakat yang tercantum dalam program pemerintah desa tidak berjalan disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat. Program pemerintah desa yang berjalan baik dengan dibiayai dana desa yaitu pembangunan infrastruktur seperti sarana dan prasarana desa berupa perbaikan tempat ibadah, kantor desa, poskedes, dan pembangunan gedung serba guna. Pada proses pembangunan infrastruktur tersebut masyarakat ikut serta andil dalam pembangunan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Desa Buata bahwa masyarakat kurang mendukung program pemberdayaan masyarakat akan

tetapi aktif terlibat dalam program pembangunan infrastruktur di desa. (*Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Buata Tanggal 28 Juni 2021*).

Tingkat partisipasi pada tahap implementasi hasil pembangunan merupakan tingkatan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pembangunan desa yaitu berupa pemanfaatan hasil pembangunan baik infrastruktur maupun pemberdayaan.

Menurut Sekretaris Desa Buata bahwa mewujudkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang efektif dan efisien harus memperhatikan kegiatan pengorganisasian, agar dalam pelaksanaan penggunaan ADD tepat sesuai yang telah direncanakan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengorganisasian ADD di Desa Buata sejauh ini untuk pelibatan partisipasi masyarakat untuk bergotong-royong masih terbuka lebar. Tidak ada batasan dari Pemerintah Desa Buata untuk suka rela terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ADD. Bahkan Pemerintah Desa sejauh ini sangat mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD tersebut. Pengorganisasian antara Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut aktif dalam pelaksanaan ADD sejauh ini dilakukan dengan mengajak masyarakat melalui kepala-kepala dusun dan melalui acara-acara resmi, seperti pengajian, pembersihan lingkungan desa dan acara-acara hajatan lainnya.

Hasil wawancara dengan Jafar Nulaini salah satu masyarakat Desa Buata, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa yaitu ikut serta dalam kerja bakti dan ikut serta dalam acara-acara resmi seperti hajatan dan pertemuan seluruh

masyarakat. (*Hasil Wawancara* dengan Jafar Nulaini Tokoh Masyarakat, Tanggal 28 Juni 2021).

Ditambahkan pula oleh Husen Dunggio yang menyatakan:

Saya dan warga lainnya ikut serta dalam kerja bakti dan turut serta dalam acara hajatan di desa wakat, untuk kegiatan lainnya tidak pernah saya mengikutinya. (*Hasil Wawancara* dengan Husen Dunggio Tokoh Masyarakat, Tanggal 02 Juli 2021).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang turut serta dalam setiap kegiatan baik itu kegiatan pembangunan desa maupun kegiatan kerja bakti dan kegiatan lainnya.

Ditambahkan pula oleh Saleha Helingo yang menyatakan:

Saya dan ibu-ibu anggota PKK ikut serta dalam program pembinaan organisasi perempuan. Pada program PKK ini saya sebagai anggota PKK ikut serta dalam kegiatan majelis taklim, dan pengajian di rumah-rumah warga dan tadarusan di masjid. Hal ini kami lakukan tidak rutin hanya satu minggu satu kali. (*Hasil Wawancara* dengan Saleha Helingo Tokoh Masyarakat, Tanggal 02 Juli 2021).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sance Monoarfa yang menyatakan:

Saya juga anggota PKK ikut dalam kegiatan majelis taklim di rumah-rumah warga dan tadarusan di masjid, tapi pelaksanaannya tidak setiap hari dilaksanakan. (*Hasil Wawancara* dengan Sance Monoarfa Tokoh Masyarakat, Tanggal 02 Juli 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dalam hal kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya sebatas pada keikutsertaan mereka pada kerja bakti pembesihan lingkungan secara kegiatan pengajian dan program pembinaan organisasi PKK.

4) Perkembangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Perkembangan kemiskinan di Desa Wakat selama 2020 menunjukkan kecenderungan menurun. Berdasarkan data observasi peneliti menunjukkan bahwa kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar 36 keluarga dan berkurang menjadi 10 keluarga pada Maret 2021. Artinya dalam kurun waktu 1 tahun kemiskinan berkurang sebesar 26 keluarga. Hal ini dapat diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Desa Buata, beliau mengatakan:

“dengan adanya Alokasi Dana Desa, masyarakat yang ekonominya lemah atau miskin menurun sejak tahun 2021. Pada tahun 2020 jumlah masyarakat yang tergolong miskin berjumlah 36 keluarga dengan adanya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa dengan didanai dengan Dana Desa berkurang menjadi 10 keluarga”.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa bahwa semenjak bulan maret tahun 2021, tingkat kemiskinan masyarakat menurun hingga 10 keluarga berkat adanya Alokasi Dana Desa. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Buata sudah bisa menangani kemiskinan dikalangan keluarga yang ekonominya lemah atau di bawah rata-rata. (*Hasil Wawancara* dengan Kepala Sekretaris Desa Buata Tanggal 02 Juli 2021).

Ditambahkan pula oleh Jafar Nulaini yang menyatakan:

Dengan adanya dana desa segala kebutuhan desa terpenuhi sebagaimana mestinya. Di Desa Buata ada 36 keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah desa yang tergolong masyarakat miskin. Dengan adanya bantuan tersebut masalah kemiskinan dan kecukupan hidup masyarakat terbantukan. (*Hasil Wawancara* dengan Jafar Nulaini Tokoh Masyarakat Desa Buata Tanggal 03 Juli 2021).

Dengan adanya dana desa masyarakat yang tergolong miskin terbantuan dengan alokasi dana desa yang telah dialokasikan dan direncanakan bersama dalam program mensejahterakan masyarakat.

Pernyataan di atas diperkuat Tajri Sunge yang menyatakan:

Masyarakat di desa Wakat pada tahun 2020 ada 36 KK yang tergolong masyarakat ekonominya lemah. Alhamdulilah pada tahun 2021 dengan adanya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa, segala kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan adanya bantuan dari pemerintah, sehingga pada tahun 2021 masyarakat yang tergolong ekonominya lemah sebanyak 36 keluarga berkurang 26 keluarga menjadi 10 keluarga yang tergolong ekonomi lemah. (*Hasil Wawancara dengan Tajri Sunge Ketua LPM Tanggal 03 Juli 2021*).

Bagaimanapun, pembangunan harus menempatkan manusia sebagai pusat perhatian atau sebagai subjek yang berperan aktif, sedangkan proses pembangunannya harus menguntungkan semua pihak. Dalam konteks ini, masalah kemiskinan, kelompok rentan, dan semakin meningkatnya pengangguran perlu mendapat perhatian utama. Di Desa Buata pembangunan infrastruktur telah berhasil dilakukan oleh pemerintah desa seperti bangunan serba guna, tempat ibadah, kantor desa dan sarana lainnya.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan masyarakat di Desa Buata dengan adanya dana desa menjadi berkurang yang dari 36 keluarga yang tergolong keluarga ekonomi lemah menjadi 10 keluarga saja yang termasuk keluarga miskin. Pemerintah Desa Buata membangun infrastruktur dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Hal tersebut yang mengurangi angka kemiskinan masyarakat di Desa Wakat sejak tahun 2021 sampai sekarang ini.

4.1.3 Hambatan Dan Solusi Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Pada Masyarakat Di Desa Buata Kecamatan Atinggola

Berdasarkan hasil penelitian peneliti dapat dikatakan dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Buata masyarakat mengalami beberapa kendala diantaranya masyarakat kurang ikut berpartisipasi, dan Kualitas sumber daya manusia di Desa Buata masih rendah, dilihat dari jenjang pendidikan yang di tempuh oleh perangkat desa masih sebatas lulusan SMP dan SMA. Selain itu masyarakat di Desa Buata juga masih banyak yang hanya lulusan SD, SMP dan SMA. Ini menyebabkan kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa sehingga mereka belum maksimal untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selain lulusan SD, SMP, SMA di Desa Buata juga sedikit masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan S1. Hal ini dapat diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Desa Buata, beliau mengatakan:

“Di desa, kebanyakan masyarakat pendidikannya masih rendah. Hanya sebatas lulusan SMP atau SMA bahkan ada masyarakat di desa yang hanya lulusan SD, meskipun juga ada beberapa masyarakat desa yang sudah menempuh pendidikan sampai ke S1. Karena rendahnya jenjang pendidikan masyarakat maka pengetahuan dari masyarakat desa tentang pembangunan desa masih rendah, mereka masih banyak yang belum paham bagaimana cara-cara untuk ikut membangun desa. Sedangkan untuk masyarakat yang pendidikannya sudah bisa sampai mencapai S1, mereka masih menempuh pendidikannya masing-masing di perguruan tinggi. Masyarakat lainnya memilih bekerja di luar daerah. Karena

mereka memilih untuk bekerja diluar daerah maka mereka juga tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Upaya yang diambil oleh pemerintah desa dalam mengatasi hal tersebut yaitu dengan memberikan penguatan tentang penting pendidikan dan peran serta dalam pembangunan desa melalui sosialisasi dan bimtek yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Gorontalo Utara maupun provisi Gorontalo.” (*Hasil Wawancara* dengan Kepala Desa Buata Tanggal 10 Juli 2021).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Yusrin Desei yang menyatakan:

Dalam pembangunan desa sangat kurang masyarakat yang ikut serta dengan programnya pemerintah desa yang menciptakan kondisi lingkungan aman, tertib dan sehat yang merupakan visi dari pada Pemerintah Desa Buata. masyarakat kurang sekali ikut serta dalam bimbingan teknis tentang pembangunan desa karena mungkin pemahaman masyarakat yang kurang tentang pentingnya BIMTEK tersebut atau mungkin karena tingkat pendidikannya yang hanya sampai di SD, SMP saja. Untuk mengatasi pemahaman masyarakat tersebut kami memberikan penguatan dan penjelasan tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa untuk mencapai desa yang berkategori baik dan sejahtera melalui rapat-rapat yang kami selenggarakan di Desa. (*Hasil Wawancara* dengan Yusrin Desei Kaur Pemerintah Desa Buata Tanggal 10 Juli 2021).

Hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, menjadi hambatan dalam pembangunan desa.

Ditambahkan pula oleh Sekretaris Desa menyatakan:

Ketidak ikut sertaan aparat desa dalam kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) menyebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa. sehingga, aparat desa tidak bisa menggerakan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa dengan baik. Hal tersebut menjadikan masyarakat kurang berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Untuk mengatasi hal tersebut kami telah melakukan penguatan tentang pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan desa melalui rapat-rapat resmi yang

diselenggara di desa. (*Hasil Wawancara* dengan Sekretaris Desa Buata Tanggal 10 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Desa Buata masih rendah. Ini dikarenakan masih banyak masyarakat di Desa Buata yang pendidikannya masih rendah, sehingga pengetahuan mereka tentang pengelolaan alokasi dana desa juga masih belum maksimal. Masyarakat desa yang sudah menempuh pendidikan tinggi lebih memilih untuk bekerja di luar desa, itu menyebabkan mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Beberapa penyebab di atas, mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Solusi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Buata untuk mengatasi rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, pemerintah melakukan penguatan dan penjelasan tentang pentingnya peran dan keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa melalui rapat-rapat evaluasi kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Buata.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Pada Masyarakat Di Desa Buata Kecamatan Atinggola

1) Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan dana desa. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun

2014). Disisi lain pemerintah desa membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang meliputi RPJM Desa dan RKP Desa. RKP Desa mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan dilaksanakan melalui Musrenbangdes.

Rancangan RKP Desa

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Buata sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja. Setelah itu membuat SPP untuk mencairkan dana guna membiayai program kerja yang dilaksanakan oleh TPK. Mekanisme pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Buata telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam penatausahaananya, harus menggunakan sistem yang telah memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan menggunakan aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP. Di desa Buata telah menggunakan aplikasi SIMDA Desa.

Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa telah dimulai dari perencanaan desa yang tertuang dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Namun tahap pelaksanaan lebih sering diidentikkan dengan proses realisasi anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaanya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Pengelolaan Keuangan Desa yang di dalamnya terdapat dana desa di Desa Buata sendiri melibatkan masyarakat desa secara menyeluruh melalui rapat yang

dilaksanakan pada tingkat dusun, dimana masyarakat sering menyebutnya rembug/rapat lingkungan. Hal yang dibahas di dalam rapat lingkungan meliputi permasalahan di tingkat dusunsaja, salah satu contohnya adalah adanya gorong-gorong kerusakan atau selokan yang tersumbat di dusun I dan penanggulangan ekonomi masyarakat yang lebih dikhususkan kepada keluarga yang ekonominya lemah. Pada tahap perencanaan masyarakat juga mengusulkan solusi dari masalah yang ditemukan. Selanjutnya usulan masalah dan solusi tersebut dibawa oleh perwakilan setiap dusun ke tingkat Musyawarah Desa. Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Buata hanya diikuti oleh perangkat Desa dan orang-orang tertentu yang memperoleh undangan rapat, sedangkan bagi masyarakat umum tidak semua yang hadir dalam rapat tersebut. Tidak adanya kehadiran ini menyebabkan masyarakat umum cenderung tidak mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa di tahun yang akan berjalan. Tidak adanya kehadiran mayarakat umum dalam menghadiri Musrenbangdes secara langsung menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kegiatan apa saja yang akan didanai oleh dana desa. Hal tersebut berimplikasi pada pola pikir mayarakat yang hanya tau desa mendapatkan uang banyak sedangkan sumber uang dan kegunaan uang masyarakat cenderung tidak mengetahuinya.

2) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui organisasi PKK di Desa Buata sangat memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai

sarana yang ada serta dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, Dana Desa di Desa Buata tahun 2021 yang 91% diperuntukkan bagi bidang pembangunan dapat mencapai realisasi *output* sebesar 100% sesuai dengan RKPDesa dan APBDesa Buata tahun 2021 berupa 15 program dan kegiatan pembangunan terlaksana, menghasilkan 5 unit bangunan fisik baru dan 1 bangunan fisik hasil rehabilitasi yang dapat dilihat, dirasakan dan digunakan oleh masyarakat secara langsung.

Disisi lain, 8% dana bidang pemberdayaan pada tahun 2021 digunakan untuk pemberdayaan aparatur pemerintah Desa Buata menghasilkan *output* fisik berupa RKPDesa dan APBDesa yang merupakan dokumen rutin yang harus disusun oleh pemerintah Desa Buata setiap tahun, data potensi, monografi dan kependudukan desa serta perangkat komputer yang dipakai di kantor desa. *Output* berupa data potensi, monografi dan kependudukan desa masih berupa kuisioner data kasar yang belum diolah menjadi data lengkap dalam bentuk dokumen profil maupun monografi desa sesuai dengan *output* yang direncanakan dalam RKPDesa dan output berupa perangkat computer hanya terbatas untuk digunakan oleh perangkat desa pada saat jam kerja saja, belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara itu, *output* non-fisik bidang pemberdayaan dana desa dilakukan dengan mengembangkan kerajinan ibu-ibu PKK membuat olahan berbagai kue kering dan olahan kue lainnya untuk diproduksi dan di distribusikan di Kecamatan Atinggola khususnya di Desa Buata. Kerajinan ini didukung oleh pemerintah desa dengan bersumber dari dana desa

untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bersama maupun kelompok. Selain itu juga dengan dana desa pemerintah Desa meningkatkan ketahanan pangan padi lading dan sawah dengan melibatkan seluruh para petani di Desa Buata, dengan program tersebut masalah kebutuhan ekonomi masyarakat terbantukan dengan mengurangi beban ekonomi.

3) Partisipasi Masyarakat

Dalam partisipasi masyarakat untuk menghadiri rapat dan mengambil keputusan guna menentukan waktu pelaksanaan program pembangunan di Desa Buata tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah.

Berdasarkan temuan tersebut dapat diketahui bahwa sangat rendah tingkat partisipasi masyarakat di Desa Buata disebabkan tidak semua masyarakat umum yang menghadiri pertemuan/rapat dari pemerintah Desa sehingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan juga kurang baik. Sedangkan untuk tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan desa juga tergolong rendah dalam berpartisipasi. Dalam hal pengawasan dan evaluasi, tingkat partisipasi masyarakat lebih banyak yang terlibat melakukan pengawasan dan penilaian. Tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan proyek di Desa Buata tergolong baik.

4) Perkembangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Dari hasil penelitian peneliti, angka kemiskinan pada masyarakat di Desa Buata pada tahun 2020 berjumlah 36 keluarga yang termasuk masyarakat yang ekonominya lemah, namun setelah adanya program pemerintah Desa Buata yang didanai dari Alokasi Dana Desa, seperti pembangunan infrastruktur yang

mendukung kegiatan bertani oleh para petani dan bantuan lainnya yang membantu petani dalam pengolahan lahannya, angka kemiskinan berkurang 26 keluarga pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2021 terdata masyarakat yang ekonominya lemah berjumlah 10 keluarga yang saat ini ekonominya lemah.

4.2.1 Hambatan Dan Solusi Dalam Pengetasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Pada Masyarakat Di Desa Buata Kecamatan Atinggola

Kendala yang sering dihadapi oleh pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan di Desa Buata yaitu kurangnya peran serta dan keikutsertaan masyarakat dalam program Pemerintah Desa dan rendahnya pendidikan masyarakat itu sendiri, sehingga sumber daya masyarakat dan pengetahuan mereka dalam pengelolaan dana desa sangat rendah. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya dan tidak berjalan secara efektif apa yang telah menjadi program pemerintah desa. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah desa telah melakukan pembinaan dan pengaraha tentang pentingnya pembangunan desa melalui dana desa untuk meningkatkan kesejehateraan masyarakat melalui rapat yang dilakukan pemerintah desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Pada Masyarakat di Desa Buata Kecamatan Atinggola

- a) Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Buata

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Buata tahun 2021 berdasarkan indikator kepatuhan terhadap prosedur telah terwujud. Hal tersebut karena seluruh rangkaian prosedur atau tahapan pengelolaan Dana Desa tahun 2020 oleh pemerintah Desa Buata taat dan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

- b) Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah mengupayakan pembangunan dan pemberdayaan di Desa Buata dengan adanya pembangunan infrastruktur yang berguna bagi masyarakat luas serta menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang ekonominya lemah atau miskin dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.

- c) Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih kurang efektif dalam hal kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi masyarakat hanya sebatas pada keikutsertaan mereka pada kerja bakti pembesihan lingkungan secara kegiatan pengajian dan program pembinaan organisasi PKK.

d) Perkembangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat

Berdasarkan penelitian, ditarik kesimpulan bahwa angka kemiskinan masyarakat di Desa Buata dengan adanya dana desa menjadi berkurang yang dari 36 keluarga yang tergolong keluarga ekonomi lemah menjadi 10 keluarga saja yang termasuk keluarga miskin. Pemerintah Desa Buata membangun infrastruktur dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Hal tersebut yang mengurangi angka kemiskinan masyarakat di Desa Buata sejak tahun 2020 sampai sekarang ini.

2) Hambatan Dan Solusi Dalam Pengetasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Pada Masyarakat Di Desa Buata

Hambatan yang sering kali dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaksanakan program adalah kualitas sumber daya manusia di Desa Buata masih rendah. Ini dikarenakan masih banyak masyarakat di Desa Buata yang pendidikannya masih rendah, sehingga pengetahuan mereka tentang pengelolaan alokasi dana desa juga masih belum maksimal. Masyarakat desa yang sudah menempuh pendidikan tinggi lebih memilih untuk bekerja di luar desa, itu menyebabkan mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Beberapa penyebab di atas, mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Solusi atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Buata untuk mengatasi rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, pemerintah melakukan penguatan dan penjelasan tentang pentingnya peran dan keikutsertaan masyarakat dalam

membangun desa melalui rapat-rapat evaluasi kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Buata

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah:

- 1) Pengelolaan dana desa lebih ditingkatkan lagi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan berorientasi pada pengorganisasian usaha desa sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya
- 2) Bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi lagi dalam keikutsertaan dalam membangun desa serta menjalankan segala program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Isbandi Rukminto. *Jurnal: Kemiskinan Multidimensi*. Makara, Sosial Humaniora : Vol 9, No.01. 2005.
- ArikuntoSuharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktikEdisiRevisi VI*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.2006.
- Chambers, Robert, *Rural Development, Putting the Last First*, Longman: London. 2013.
- Egon E. Bergel. *Urban Sociology*, New York: McGraw-Hill. 2005
- Haw Widjaja, *OtonomiDesaMerupakanOtonomi yang Asli, BulatdanUtuh*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Hehamahua, Hayati. (2015). *Impact Analysis of the Village Fund Allocation (ADD) Toward Economic Community (Case Study on the Rural District of NamleaSiahoni)*, Buru Regency. Journal of Social and Development Sciences Vol. 6 No. 3 pp 15-23 ISSN 2221-1152
- Hidayat, Wisnu, dkk (tt) *Pembangunan Partisipatif*. Penerbit YPAPI Yogyakarta. 2008.
- Hikmat, Harry, *StrategiPemberdayaanMasyarakat*. PenerbitHumaniora Bandung. 2004.
- Kurniati. *Manajemen Keu ngan Daerah*. Yogyakarta: IRE-CCES. 2016.
- Lofland, dalam Lexy J Maleong “*Metode Penelitian Kualitatif*” (Bandung, PT Remaja Rosdakarya.,2011.
- Mardiasmo. *Otonomidan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI. 2002.
- Moeljarto. *PolitikPembanguanSebuahAnalisisKonsep, ArahdanStrategi*, PT. Tiara Wacana : Yogyakarta. 2005
- Nasution, *Metode Research*, Bandung: JEMMARS, 1991.
- Nugroho, GunarsoDwi. ModulGlobalisasi. Banyumas. CV. CahayaPustaka : 2006.
- Oktaresa. *PelaksanaanKebijakanAlokasi Dana Desa (ADD) dalam MemberdayakanMasyarakatDesa*. KebijakandanManajemenPublik Vol. 2 No. 1 Januari 2014 ISSN 2303-341X. 2015.

PahmiSy. *PerspektifBaruAntropologiPedesaan*. Jakarta :GaungPersada. Press. 2010.

Peraturan Daerah KabupatenBuolNomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12)

PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 37 Tahun 2007 TentangPedoman PengelolaanKeuanganDesa, Pasal 18

Rahardjo, *PengantarSosiologiPedesaan dan SosiologiPertanian*, Yogyakarta: UGM Press, 2009.

Republik Indonesia. PeraturanPemerintah No. 72 TentangDesa. Jakarta. 2005.

RustiadidanPranoto, Agopolitan: *MembangunEkonomiPerdesaan*, Bogor: Crestpent Press, 2007.

Saefuddin, Asep, dkk Tim Crescent. *MenujuMasyarakatMandiri*. Penerbit PT GramediaPustakaUtamaJakarta. 2003.

SlametSantoso, dkk. PendidikanKewarganegaraan. Unsoed : Purwokerto, 2005.

SoeriaAtmadja P. Arifin, *KeuanganPublikDalmPerspektifHukum*, (Jakarta: RajawaliPers, 2009.

Suharto Edi. *KonsepKemiskinan*. Bandung: Pustaka, 2002.

Sumodiningrat, Gunawan, *PemberdayaanMasyarakat, JaringPengamanSosial*, Penerbit PT Gramedia. 2009.

SurachmadWinarno, *PengantarIlmiahDasar, MetodeTehnik*. Bandung: Tarsito. 1986.

Suwarsonodan Alvin Y. SO. *PerubahanSosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : LP3ES. 1991.

Suyanto, Bagong. *Anatomikemiskinan dan StrategiPenanganannya*. Malang : In-Trans Publishing. 2013.

Tim PenyusunDepartemenPendidikan Nasional, *KamusBesar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa EdisiKeEmpat*, Jakarta: GramediaPustakaUtama, 2011.

Todaro, Michael P. *Pembangunan ekonomiedisikesembilan*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e)

Warsono, Hardian Ruksamin. *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. Journal of Management and Sustainability Vol. 4 No. 3, ISSN 1925- 4725 EISSN 1925-4733. 2014.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kepala Desa dan Aparat Desa

Nama :

Jabatan :

Alamat :

1. Bagaimana pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah desa melalui dana desa di Desa Buata ?
2. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buata ?
3. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Buata?
4. Bagaimana pemerintah desa Buata mewujudkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pengentasan kemiskinan ?
5. Apa saja sasaran penggunaan dana desa di desa Buata ?
6. Apa saja tujuan penggunaannya ?
7. Apa saja yang menjadi program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pemerintah desa lakukan ?
8. Bagaimana perkembangan tingkat kemiskinan masyarakat dengan adanya Alokasi Dana Desa ?
9. Apakah dengan adanya Alokasi Dana Desa tingkat kemiskinan masyarakat menurun ?
10. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pengentasan kemiskinan melalui dana Desa di desa Buata ?
11. Bagaimana solusi dalam menghadapi hambatan tersebut ?

Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

NO	ASPEK YANG DIAMATI	HASIL PENGAMATAN
1	Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa	
2	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
3	Partisipasi Masyarakat	
4	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Masyarakat	

Lampiran 3

Daftar Informan

No	Nama	JABATAN
1	Adam Is Hamidjun,	Kepala Desa Buata
2	Hartono Datau	Sekretaris Desa
3	Hadijah Monoarfa	Kaur Perencanaan
4	Yusrin Desei	Kaur Pemerintahan
5	Anis Abdullah	Bendahara Desa
6	Hasan Taabi	Ketua BPD
7	Tajri Sunge Ketua	Ketua LPM
8	Sance Monoarfa	Tokoh Masyarakat
9	Saleha Helingo	Tokoh Masyarakat
10	Yunus Desei	Tokoh Masyarakat
11	Husen Dunggio	Tokoh Masyarakat
12	Jafar Nulaini	Tokoh Masyarakat



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3364/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/IV/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Buata

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Taufik Adahu
NIM : S2117019
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DESA BUATA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA
Judul Penelitian : PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA PADA MASYARAKAT DESA BUATA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
KECAMATAN ATINGGOLA
DESA BUATA

Jln. PLTM Mongango Desa Buata

SURAT PENGANTAR

No : 145/DB-ATG/112/VIII/2021

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi No. 070/KesbangPol/1407 Tentang Penelitian Mahasiswa, maka dengan ini menerangkan kepada :

Nama : TAUFIK ADAHU

NIM : S2117019

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Bawa Mahasiswa tersebut diatas adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Buata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara guna melengkapi data pada Pengurusan Skripsi yang berjudul " PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI DANA DESA PADA MASYARAKAT DI DESA BUATA KECAMATAN ATINGGOLA KABUPATEN GORONTALO UTARA ".

Buata, 23 Agustus 2021

KERAPATIAPAN DESA/BUATA





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0803/UNISAN-G/S-BP/X/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : TAUFIK ADAHU
NIM : S2117019
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa Pada Masyarakat Di Desa Buata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 12 Oktober 2021
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



S2117019

SKRIPSI_S2117019_TAUFIK ADAHU_PENGENTASAN KEMISKIN...

Sources Overview

31%

OVERALL SIMILARITY

1	eprints.undip.ac.id INTERNET	9%
2	www.scribd.com INTERNET	5%
3	repository.unwira.ac.id INTERNET	3%
4	123dok.com INTERNET	2%
5	ejurnal.unisan.ac.id INTERNET	2%
6	repository.radenintan.ac.id INTERNET	2%
7	www.jogloabang.com INTERNET	1%
8	segerengjiwo.wordpress.com INTERNET	<1%
9	repository.uir.ac.id INTERNET	<1%
10	anzdoc.com INTERNET	<1%
11	repository.usu.ac.id INTERNET	<1%
12	konsultasiskripsi.com INTERNET	<1%
13	core.ac.uk INTERNET	<1%
14	peraturan.bpk.go.id INTERNET	<1%
15	affandi080.blogspot.com INTERNET	<1%
16	www.docstoc.com INTERNET	<1%

17	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%
18	www.neliti.com	INTERNET	<1%
19	jimfeb.ub.ac.id	INTERNET	<1%
20	etheses.uln-malang.ac.id	INTERNET	<1%
21	satriamootilango.blogspot.com	INTERNET	<1%
22	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%
23	es.scribd.com	INTERNET	<1%
24	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None